

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang dan Masalah**

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor penting yang patut diperhitungkan dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Negara Indonesia yang merupakan negara agraris menjadikan sektor pertanian sebagai faktor dominan dalam menyediakan bahan baku industri, menyediakan lapangan kerja, menjadi sumber pendapatan sekaligus devisa negara, dan upaya pengentasan kemiskinan khususnya yang berada di daerah perdesaan serta terwujudnya ketahanan pangan daerah maupun nasional.

Perekonomian di Provinsi Lampung berkaitan erat dengan sektor pertanian. Pengaruh sektor ini dapat dilihat dari berbagai sub-sektor yaitu tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Besarnya distribusi produk domestik bruto Indonesia menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku dari masing-masing sub-sektor tersebut dari tahun 2006 hingga 2010 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Distribusi produk domestik bruto Indonesia sektor pertanian atas dasar harga konstan tahun 2011 menurut lapangan usaha

Lapangan Usaha	2006 (%)	2007 (%)	2008 (%)	2009 (%)	2010 <sup>*</sup> (%)
1. Tanaman Bahan Makanan	7,01	6,82	6,82	6,84	6,55
<b>2. Tanaman Perkebunan</b>	<b>2,24</b>	<b>2,20</b>	<b>2,15</b>	<b>2,09</b>	<b>2,04</b>
3. Peternakan	1,81	1,74	1,70	1,68	1,65
4. Kehutanan	0,90	0,84	0,79	0,77	0,75
5. Perikanan	2,24	2,22	2,20	2,19	2,19

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2011

Keterangan:

\* = angka sementara

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa perkebunan menempati urutan ketiga sebagai penyumbang PDB Indonesia dari sektor pertanian dan diharapkan mampu menjadi penghasil devisa bagi negara. Sumbangan sub-sektor perkebunan dalam pembentukan PDB Indonesia cenderung stabil dengan rata-rata persentase kontribusi sebesar 2,14 % sejak tahun 2006 hingga 2010. Hal yang perlu diperhatikan adalah adanya perbaikan dan penyempurnaan iklim usaha dan struktur pasar komoditas perkebunan dari sektor hulu sampai hilir. Komoditi-komoditi perkebunan tersebut antara lain kopi, kapuk, jambu mete, aren, cabe jawa, cengkeh, kelapa hibrida, kelapa dalam, kakao, lada, karet, kelapa sawit, nilam, tembakau, tebu, dan wijen.

Salah satu komoditi sub-sektor perkebunan adalah tanaman kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit merupakan tanaman penghasil minyak nabati yang paling efisien dibandingkan dengan tanaman penghasil minyak nabati lainnya di dunia. Di Indonesia tanaman ini merupakan komoditas andalan ekspor, dan sangat berperan dalam pembangunan ekonomi nasional terutama dalam penyediaan lapangan kerja, penyediaan bahan baku minyak goreng dan bahan baku biofuel. Bagi dunia usaha, agribisnis kelapa sawit

merupakan usaha yang sangat menjanjikan untuk menghasilkan profit, sehingga banyak diminati (Hakim, 2007).

Peningkatan produktivitas juga menjadi tujuan utama bagi para pelaku usahatani untuk mendapatkan laba yang maksimal. Upaya meningkatkan produktivitas adalah masalah yang lazim dihadapi petani. Kendala teknis, biologis, dan kendala sosial ekonomi seringkali dipakai oleh para peneliti untuk mengidentifikasi masalah produktivitas ini. Tinggi rendahnya produktivitas kelapa sawit juga tergantung dari komposisi umur tanaman. Semakin banyak komposisi umur tanaman remaja dan renta, semakin rendah pula produktivitas per hektarnya. Begitu pula dengan hal sebaliknya, apabila semakin banyak tanaman dewasa dan taruna, maka semakin tinggi pula produktivitas per hektarnya.

Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah penghasil kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit terdapat di beberapa kabupaten, antara lain Kabupaten Lampung Tengah. Sebaran luas areal dan produksi perkebunan rakyat kelapa sawit di Kabupaten Lampung Tengah disajikan pada Tabel 2. Tabel sebaran luas areal dan produksi perkebunan rakyat tersebut menunjukkan bahwa produktivitas kelapa sawit di Kabupaten Lampung Tengah mengalami peningkatan sejak tahun 2009 dan naik sebesar 2.494 kg/ha di tahun 2010 hingga produktivitas mencapai 2.557 kg/ha pada tahun 2011.

Tabel 2. Sebaran luas areal dan produksi perkebunan rakyat kelapa sawit di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2012

<b>Tahun</b>	<b>TBM (Ha)</b>	<b>TM (Ha)</b>	<b>TR (Ha)</b>	<b>Jumlah (Ha)</b>	<b>Produksi (Ton)</b>	<b>Produktivitas (Kg/Ha)</b>
2009	1.658	7.889	15	9.562	22.450	2.347
2010	1.606	8.389	17	10.012	24.975	2.494
2011	1.206	8.789	19	10.007	25.575	2.557

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2012

Keterangan:

TBM = Tanaman Belum Menghasilkan

TM = Tanaman Menghasilkan

TR = Tanaman Rusak

Kondisi kegiatan usahatani kelapa sawit masih memerlukan dukungan kelembagaan untuk memperbaiki sistemnya baik dari perusahaan-perusahaan besar negara, perusahaan besar swasta, hingga pemerintah daerah setempat. Pelaku usaha BUMN yang ikut ambil bagian dalam hal menjalankan usaha agrobisnis perkebunan dengan komoditas karet, teh, tebu, dan kelapa sawit adalah PT Perkebunan Nusantara VII. Salah satu unit usaha PTPN VII yang telah dipilih menjadi lokasi penelitian adalah PTPN VII Unit Usaha Bekri karena pertimbangan adanya terjalin kemitraan unit usaha dengan petani kelapa sawit. Hasil panen PTPN VII Unit Usaha Bekri adalah berupa Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit. Pencapaian produksi TBS PT Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Bekri mengalami peningkatan sejak tahun 2005. Peningkatan jumlah TBS yang dihasilkan kemudian terus berlanjut hingga tahun 2009. Pencapaian produksi TBS tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Pencapaian produksi Tandan Buah Segar (TBS) PT Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Bekri tahun 2003-2009

Tahun	Luas (ha)	TBS (Kg)	Produktivitas (Kg/ ha)
2003	2.159	30.630.500	14.187
2004	2.547	39.938.460	15.680
2005	2.481	32.567.990	13.127
2006	2.977	40.101.550	13.470
2007	3.278	45.481.570	13.875
2008	3.695	60.139.590	16.276
2009	4.259	71.122.340	16.699

Sumber: Profil PT Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Bekri, 2010

Pelaku usaha agribisnis di tingkat masyarakat banyak berada di sub-sistem agribisnis *on-farm*. Kegiatan usahanya cenderung marginal, dalam arti adanya keterbatasan dukungan pendanaan serta relatif masih sederhananya teknis produksi yang dipergunakan, menyebabkan pelaku usaha ini kurang dapat berkembang.

Pengusaha di sub-sistem yang lain, rata-rata merupakan pengusaha non marginal, dalam arti memiliki kapasitas usaha yang relatif cukup besar serta dukungan permodalan yang cukup baik. Ketimpangan kedua kelompok pelaku usaha ini semakin parah dengan adanya penyebaran demografis yang kurang mendukung perkembangan sektor agribisnis pada umumnya.

Akibatnya, pelaku usaha *on-farm* sering terdiskriminasikan dalam hal penentuan harga jual produknya karena faktor jarak distribusi, tingginya *cost structure*, serta kesulitan memperoleh dukungan pendanaan (Sutrisno, 2010).

Upaya untuk dapat meningkatkan kinerja para pelaku sektor agribisnis khususnya para petani *on-farm*, harus dipahami bahwa kegiatan tiga

sub-sistem agribisnis (sub-sistem agribisnis hulu, sub-sistem *on-farm*, sub-sistem pengolahan) yang ada sebenarnya saling terkait dan saling mendukung yang apabila dibiarkan masing-masing seolah terkotak-kotak dalam aktivitas usahanya, dapat berakibat kepada terjadinya diskriminasi usaha.

Menurut Sutrisno (2010), alternatif yang dapat diambil untuk mengatasi kendala terkotaknya masing-masing subsistem agribisnis, khususnya dalam rangka meningkatkan peran pelaku usaha *on-farm* adalah melalui pola kemitraan. Kemitraan yang dilakukan adalah sistem kelembagaan yang merupakan komponen-komponen dari pranata sosial dan terkait antara satu dengan yang lainnya (Koentjaraningrat, 2002).

Di bidang pertanian, kerjasama antara rakyat dengan perusahaan sangat diharapkan, dimana rakyat menjadi produsen dan produknya kemudian ditampung dan diolah oleh pihak perusahaan dan menjadi produk yang sempurna yang dapat dipasarkan. Adanya modernisasi pertanian rakyat yang dibekali PTPN VII dengan ilmu manajemen usahatani kelapa sawit (meliputi faktor-faktor usahatani seperti komoditi, modal, luas lahan, tenaga kerja, pembinaan, dan lain-lain), kerjasama rakyat dengan pihak perusahaan diperluas, perusahaan bukan hanya menampung dan mengolah hasil tanaman rakyat tetapi menyediakan input dengan kredit, mengolah tanahnya, dan memberikan bantuan lain yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan pendapatan petani mitra. Kemitraan yang dilakukan petani kelapa sawit di Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten

Lampung Tengah dengan perusahaan diharapkan dapat memberi efek positif terhadap peningkatan pendapatan petani tersebut.

Pengelolaan kebun PT Perkebunan Nusantara VII yang tidak hanya komoditi kelapa sawit melainkan meliputi kebun karet, teh dan juga tebu. Kecuali teh (komoditi yang dikelola PTPN VII yang berada di Sumatera Selatan, Distrik Muara Enim Unit Usaha Pagar Alam), kebun-kebun kelapa sawit, tebu, dan karet dikelola dengan menggunakan pola kemitraan. Luas areal kebun cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan luas areal juga diikuti dengan jumlah produksi dari tahun 1996 bahkan melebihi target hingga tahun 2001. Pada tahun 2002 terjadi penurunan produktivitas secara drastis dari tahun sebelumnya. Hal ini diakibatkan banyaknya faktor yang mempengaruhi menurunnya tingkat produktivitas lahan antara lain perubahan iklim, perawatan yang kurang, serta terjadinya penambahan luas lahan kemitraan tetapi masih belum menghasilkan sehingga jumlah produksi dibagi luas lahan yang ada mengakibatkan menurunnya produktivitas per tahun. Penurunan produktivitas secara langsung berdampak buruk terhadap perusahaan. Hal ini mengakibatkan ada kecenderungan tidak terpenuhinya target produksi dan petani mitra pun cenderung mengalami kesulitan dalam melakukan pengembalian pinjaman serta berkurangnya pendapatan. Produksi TBS kemitraan PT Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Bekri dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Produksi Tandan Buah Segar (TBS) kemitraan PT Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Bekri dengan KUD tahun 1996-2009

No	Tahun	Luas (ha)	Produksi TBS		% Target
			Target	Realisasi	
1.	1996	248	-	409.800	-
2.	1997	248	1.240.000	1.118.830	90
3.	1998	1.252	1.080.000	2.907.610	269
4.	1999	2.400	5.672.000	15.250.390	269
5.	2000	2.406	16.770.000	30.322.017	181
6.	2001	3.479	35.000.000	42.271.720	121
7.	2002	5.640	49.000.000	29.358.090	60
8.	2003	5.640	289.127.440	10.743.460	4
9.	2004	6.788	64.990.000	11.843.170	18
10.	2005	8.515	130.049.000	7.133.250	5
11.	2006	8.334	10.498.000	6.033.680	57
12.	2007	8.334	15.600.000	25.572.600	164
13.	2008	8.731	52.799.000	37.228.830	71
14.	2009	8.371	93.393.000	9.609.560	10

Sumber: Profil PT Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Bekri, 2010

Pola pengelolaan usahatani petani kelapa sawit yang bermitra dengan perusahaan ini merupakan fenomena yang menarik untuk dilakukan penelitian. Dalam penelitian ini akan dianalisis bagaimana sistem kelembagaan dan pelaksanaan pola kemitraan yang diterapkan oleh PTPN VII juga pengaruh yang ditimbulkan, serta kelayakan finansial usahatani kelapa sawit petani yang bermitra dengan perusahaan di Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan uraian di atas berkaitan dengan sistem kelembagaan dan kelayakan finansial usahatani kelapa sawit petani di Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Bangun Rejo maka masalah yang akan dianalisis pada penelitian ini adalah:



1. Bagaimanakah sistem kelembagaan dalam pengelolaan usahatani kelapa sawit yang menerapkan pola kemitraan di Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pola kemitraan dalam usahatani kelapa sawit antara petani dan perusahaan di Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah?
3. Apakah usahatani kelapa sawit petani yang bermitra dengan perusahaan di Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah layak untuk diusahakan?

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini memiliki tujuan, antara lain:

1. Mengetahui sistem kelembagaan dalam pengelolaan usahatani kelapa sawit yang menerapkan pola kemitraan di Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah.
2. Mengetahui pelaksanaan pola kemitraan dalam usahatani kelapa sawit antara petani dan perusahaan di Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah.
3. Mengetahui kelayakan finansial usahatani kelapa sawit petani yang bermitra dengan perusahaan di Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah.

### **C. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan :

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi penentuan kebijakan pola kemitraan dengan petani sebagai mitra perusahaan dan bentuk kerjasama perusahaan dengan masyarakat sekitar.
2. Sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi pengusaha perkebunan kelapa sawit untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit.
3. Menjadi bahan referensi peneliti lain untuk penelitian sejenis.